

**KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN  
RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Lilis Finawati  
130810279**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

**KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN  
RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Lilis Finawati  
130810279**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Yang membuat pernyataan

Lilis Finawati

130810279

**KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN  
RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**Oleh:  
Lilis Finawati  
130810279**

**SKRIPSI  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 14 Februari 2017**

**Serli Diovani Teza, S.Pd., M.Pd.E.  
Pembimbing**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI selaku ketua program studi akuntansi Universitas Putera Batam.
3. Ibu Serli Diovani Teza, S.Pd., M.Pd.E. selaku pembimbing skripsi pada program studi akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Segenap dosen dan staff Universitas Putera Batam yang telah membantu dan memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Putera Batam.
5. Kedua orang tua serta abang dan adik penulis yang memberikan dukungan, doa, waktu serta penyemangat yang sangat luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Rekan akuntansi angkatan tahun 2013 yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini dan juga memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta TaufikNya, Amin.

Batam, 14 Februari 2017

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi dari retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive random sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan buku profil Dinas Pendapatan Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 populasi yang berisi laporan realisasi retribusi daerah Kota Batam. Analisis dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*statistical package for the social science*) versi 24. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hasil uji t untuk retribusi kebersihan yaitu sebesar  $3,649 > 2,012$  dengan nilai signifikan lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yaitu sebesar  $0,001 < 0,05$  yang berarti bahwa terdapat kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. 2) berdasarkan hasil uji t untuk retribusi parkir menunjukkan bahwa terdapat kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam yang diperoleh sebesar  $4,283 > 2,012$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . 3) Tidak terdapat kontribusi secara signifikan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam dilihat dari uji t yang diperoleh sebesar  $0,276 < 2,012$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,784 > 0,05$ . Tidak terdapat kontribusi secara signifikan retribusi ini dikarenakan realisasi dan target yang diperoleh sangat kecil terhadap kontribusinya pada pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci: Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah**

## ABSTRACT

*The research has goal to know the impact of contribution's cleanness, contribution's parking, and contribution's market toward region's incomes of Batam. The selection of the sample using purposive random sample. The data collection techniques used by observation, documentation, and literature study from the documentation profile of DPKB (Dinas Pendapatan Kota Batam). The population of these research are 60 populations in which fulfill the requirement in the report of realization levies Kota Batam. Data analysis technique using SPSS (statistical package for the social science) version 24. The result of these research that: 1) The result of t-test for contribution's cleanness is  $3,649 > 2,012$ , which the value of significant is smaller than  $\alpha$  is  $0,001 < 0,05$  which mean contribution's cleanness has significant impact on region's incomes. 2) the result of t-test for retribution parking shown that contribution's parking has significant Impact on region's incomes which value of t-test is  $4,283 > 2,012$  and significant value is  $0,000 < 0,05$ . 3) Not found the significant impact for contribution's market on region's incomes. That shown from the result of t-test is  $0,276 < 2,012$  and the significant value is  $0,784 > 0,05$ . Contribution's market hasn't the significant impact on region's income because market give very small contribution on region incomes.*

***Keywords : Contribution's Cleanness, Contribution's Parking, Contribution's Market, and Region's Incomes.***



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2	Identifikasi Masalah .....	6
1.3	Pembatasan Masalah .....	7
1.4	Perumusan Masalah .....	7
1.5	Tujuan Penelitian .....	8
1.6	Manfaat Penelitian .....	8

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1	Teori Dasar .....	10
2.1.1	Retribusi Kebersihan .....	10
2.1.1.1	Objek Retribusi Kebersihan .....	10
2.1.1.2	Subjek Retribusi Kebersihan .....	11
2.1.1.3	Tarif Retribusi Kebersihan .....	11
2.1.1.4	Tata Cara Pembayaran, Pengangsuran dan Penundaan Retribusi .....	13
2.1.2	Retribusi Parkir .....	14
2.1.2.1	Objek Retribusi Parkir .....	14

2.1.2.2	Subjek Retribusi .....	15
2.1.2.3	Struktur dan Besarnya Tarif .....	15
2.1.3	Retribusi Pasar .....	16
2.1.3.1	Objek Retribusi Pasar .....	16
2.1.3.2	Subjek Retribusi Pasar .....	17
2.1.3.3	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa .....	17
2.1.3.4	Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi .....	17
2.1.3.5	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang .....	18
2.1.3.6	Penetapan Retribusi .....	18
2.1.3.7	Tata Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan .....	18
2.1.4	Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.1.4.1	Pendapatan Daerah .....	19
2.1.4.2	Pendapatan Asli Daerah .....	20
2.1.4.3	Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.2	Penelitian Terdahulu .....	38
2.3	Kerangka Pemikiran .....	40
2.4	Hipotesis Penelitian .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Desain Penelitian .....	42
3.2	Operasional Variabel .....	43
3.2.1	Variabel Bebas ( <i>Independent Variabel</i> ) .....	43
3.2.2	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variabel</i> ) .....	44
3.3	Populasi dan Sampel .....	45
3.3.1	Populasi .....	46
3.3.2	Sampel .....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.4.1	Jenis Data .....	47
3.4.2	Sumber Data .....	48
3.4.3	Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5	Metode Analisis Data .....	48

3.5.1	Analisis Deskriptif .....	50
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	51
3.5.2.1	Uji Normalitas .....	51
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas .....	51
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	52
3.5.2.4	Uji Autokorelasi .....	53
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	54
3.5.4	Uji Hipotesis .....	55
3.5.4.1	Uji Simultan (Uji F) .....	55
3.5.4.2	Uji Parsial (Uji T) .....	56
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi .....	57
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	58
3.6.1	Lokasi .....	58
3.6.2	Jadwal Penelitian .....	58

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian .....	59
4.1.1	Gambaran Umum Dinas Pendapatan .....	59
4.1.2	Analisis Deskriptif .....	60
4.1.3	Uji Asumsi Klasik .....	62
4.1.3.1	Uji Normalitas .....	62
4.1.3.2	Uji Multikolinearitas .....	64
4.1.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	65
4.1.3.4	Uji Autokorelasi .....	67
4.1.4	Regresi Berganda .....	68
4.1.5	Uji Hipotesis .....	70
4.1.5.2	Uji Simultan (Uji F) .....	70
4.1.5.1	Uji Parsial (Uji T) .....	71
4.1.5.3	Uji Koefisien Determinasi .....	73
4.6	Pembahasan .....	75
4.6.1	Kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah..	75

4.6.2	Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	75
4.6.3	Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	76

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Simpulan .....	78
5.2	Saran .....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

**RIWAYAT HIDUP**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Awal Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	46
Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi .....	55
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .....	59
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif .....	61
Tabel 4.2 Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	65
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas .....	66
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas .....	67
Tabel 4.5 Uji Durbin-Watson .....	69
Tabel 4.6 Uji Regresi Berganda .....	70
Tabel 4.7 Uji Parsial (Uji T) .....	72
Tabel 4.8 Uji Simultan (Uji F) .....	74
Tabel 4.9 Uji Determinasi ( $R^2$ ) .....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 4.1 Histogram Normalitas .....	63
Gambar 4.2 P-P Plot Normalitas .....	64
Gambar 4.3 Scatter Plot .....	68

# DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2.1    Perhitungan Pajak .....	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 3 Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2011 – 2015
- Lampiran 4 Hasil Olahan Data SPSS
- Lampiran 5 Titik Persentase Distribusi T
- Lampiran 6 Titik Persentase Distribusi F
- Lampiran 7 Tabel Durbin-Watson (DW)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan dan daerahnya sendiri. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini daerah dituntut untuk lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah serta menggali serta mengembangkan potensi sumber ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah guna pembiayaan dan pengeluaran daerah.

Pembiayaan dan pengeluaran daerah ini bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik sehingga masyarakat juga dapat menikmati setiap fasilitas yang diberikan.

Dalam upaya merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah dalam pembiayaan pengeluaran daerah diperlukan sumber dana yang cukup dan harus digali dari berbagai potensi salah satu sumber penerimaan daerah yaitu dari pendapatan asli daerah (PAD). Setiap daerah harus megupayakan penerimaan

sumber pendapatan daerah secara optimal, sehingga target dan ketersediaan keuangan setiap daerah tersedia guna pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka diperlukan optimalisasi penggalan dana, salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki penerimaan yang cukup penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu berasal dari retribusi daerah.

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan antara lain yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang paling penting dalam pemungutan retribusi karena retribusi daerah mempunyai keluluasaan dalam pemungutannya.

Retribusi daerah sektor jasa umum salah satunya yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (UU No 34 Tahun 2000). Ketiga retribusi ini mempunyai peranan yang penting dalam sektornya masing-masing dalam pelayanan yang telah disediakan serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Retribusi kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil. Adapun bentuk pelayanan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah antara lain; pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber sampah dan/atau Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah serta penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Retribusi pelayanan persampahan yang dipungut oleh pemerintah daerah sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya armada pengangkut sampah untuk melayani pengangkutan sampah dari sumber sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi persampahan.

Retribusi Parkir merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan hukum. Pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah masih belum sesuai harapan masyarakat dikarenakan terbatasnya lahan parkir yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan lahan parkir sehingga berakibat kepada

penarikan atau pemungutan retribusi parkir yang kurang maksimal. Penarikan atau pemungutan retribusi parkir yang dilakukan saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga masih dimungkinkan adanya kebocoran hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir.

Retribusi pasar merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar ataupun kios yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada orang/badan hukum. Pungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini belum mencapai hasil yang memuaskan dikarenakan minimnya fasilitas yang diberikan terhadap pelaku usaha/pedagang dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar. Hal ini berakibat tidak tercapainya target pungutan retribusi pasar. Disisi lain bahwa sebagian besar pasar yang ada dikota Batam adalah milik swasta sehingga retribusi pasar tidak dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

**Tabel 1.1**  
**Data Awal Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah,**  
**Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar**

Jenis Penerimaan		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
PAD	Target	276,757,849,578.60	371,655,668,413.00	515,456,622,984.00	643,356,518,018.00	812,739,614,159.94
	Realisasi	325,551,392,753.69	413,178,934,109.31	606,340,450,986.83	779,944,837,450.53	836,713,858,341.88
	%	106.36	111.17	117.63	121.33	102.95
Retribusi Kebersihan	Target	14,000,000,000	19,000,000,000	19,000,000,000	22,000,000,000	22,025,592,368
	Realisasi	13,024,155,741	17,779,149,364	19,581,989,829	21,380,934,550	18,970,197,375
	%	93.03	93.57	103.06	97.19	86.13
Retribusi Parkir	Target	1,267,722,400	5,261,350,000	4,500,000,000	3,312,067,600	6,000,000,000
	Realisasi	1,177,660,000	3,428,414,000	3,296,835,400	3,594,001,600	3,669,383,200
	%	92.90	65.16	73.26	108.51	61.16
Retribusi Pasar	Target	200,000,000	200,000,000	112,644,000	250,000,000	215,000,000
	Realisasi	200,000,000	177,574,500	108,829,000	210,330,000	234,555,000
	%	100.09	88.79	96.61	84.13	109.10

Sumber: Buku Profil Dinas Pendapatan Kota Batam

Dari tabel diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam selama 5 tahun terakhir melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun kontribusi

penerimaan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 121.33%. Sedangkan retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar mengalami kontribusi yang berbanding terbalik yaitu penerimaannya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak teratur setiap tahunnya. Retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar memiliki realisasi penerimaan yang tidak mencapai target. Pada tahun 2013 retribusi kebersihan mengalami penerimaan yang paling tinggi dengan realisasi penerimaan sebesar 103.06% sedangkan realisasi penerimaan retribusi yang paling rendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 86.11%. Terhadap retribusi parkir selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai target dan realisasi penerimaan paling tinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 108.51% dan penerimaan yang paling rendah pada tahun 2015 sebesar 61.16%. Untuk retribusi pasar realisasi penerimaan pada tahun 2011 sebesar 109.10% sedangkan realisasi penerimaan yang terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 84.13%.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisca (2013) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan perannya dalam bidang keuangan dan ekonomi. Pendapatan daerah salah satunya berasal dari retribusi yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan rutin lainnya. Dengan pesatnya laju pembangunan, maka jumlah pembiayaan yang dikeluarkan juga akan bertambah. Seiring dengan itu maka peranan retribusi dalam hal pendanaan juga akan semakin besar.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI PENERIMAAN**

## **RETRIBUSI KEBERSIHAN RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Kontribusi pada retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan mengakibatkan kurang efektifnya penerimaan retribusi tersebut akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Kurangnya pengawasan, kesadaran akan membayar retribusi serta sarana dan prasarana yang tersedia membuat retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Kurang optimalnya pelayanan pengangkutan sampah yang tidak sesuai jadwal membuat berbagai penyakit dan juga sebagian masyarakat tidak membayar retribusi kebersihan yang akan menyebabkan tidak tercapainya target realisasi yang telah ditetapkan.
4. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun membuat lahan area parkir yang berkurang sehingga tidak sesuai dengan kendaraan yang ada.
5. Dengan pemungutan yang masih dilakukan secara manual menyebabkan adanya kemungkinan bahwa pungutan yang dipungut tidak disetorkan kepada instansi terkait.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan keterbatasan penulis, waktu dan biaya, maka pembatasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Variabel independen yaitu retribusi kebersihan, retribusi pasar dan retribusi parkir yang termasuk dari retribusi daerah sektor jasa umum.
2. Variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2011-2015.

### **1.4 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kontribusi penerimaan retribusi kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?
2. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?
3. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?
4. Bagaimana kontribusi penerimaan Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Kota Batam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam.

2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Kota Batam.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Kota Batam.
4. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Kota Batam.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendapatan asli daerah dan yang berkaitan dengan retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar.
2. Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan bagi peneliti lainnya untuk penelitian selanjutnya.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

1. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kota Batam.



2. Memberi informasi bagi instansi terkait pada sektor retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar dalam meningkatkan kinerja, sarana dan prasarana.
3. Dapat memberikan pengetahuan tentang retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar kepada masyarakat bahwa pelayanan publik yang diberikan salah satunya bersumber dari hasil pengelolaan retribusi ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 Retribusi Kebersihan**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang disediakan, diberikan, diselenggarakan oleh pemerintah kota kepada orang atau badan hukum, pemilik atau pemakai komersil.

Retribusi kebersihan dipungut terhadap jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah terhadap warganya. Dengan demikian, warga yang belum mendapatkan pelayanan kebersihan tidak menjadi wajib retribusi kebersihan (Azhari, 2015;293).

##### **2.1.1.1. Objek Retribusi Kebersihan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Persampahan atau Kebersihan, objek Retribusi Kebersihan adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumber sampah atau TPS.

- b. Pengangkutan sampah dari sumber sampah atau TPS atau Tempat Pengolahan Terpadu (TPST) ke TPA.
- c. Penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi ini adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Yang dimaksud dengan tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.1.2. Subjek Retribusi**

Menurut Azhari (2015: 294) subjek atau wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan dari pemerintah daerah, yaitu:

- a. Kepala keluarga bagi rumah tinggal
- b. Pemilik/pengusaha bagi toko, rumah makan, bioskop, apotek, industri dan yang sejenisnya.

#### **2.1.1.3. Tarif Retribusi Kebersihan**

Besarnya tarif retribusi kebersihan di Kota Batam sebagai berikut:

- 1. Perumahan, kos-kosan :
  - a. Rumah sangat sederhana (<36 m<sup>2</sup>), kos-kosan : Rp 7.000/bulan
  - b. Rumah sederhana (36 s/d 54 m<sup>2</sup>) : Rp 9.000/bulan
  - c. Rumah menengah (54 s/d 120 m<sup>2</sup>) : Rp 15.000/bulan
  - d. Rumah mewah (120 m<sup>2</sup> ke atas) : Rp 50.000/bulan
  - e. Lain-lain tempat tinggal : Rp 5.000/bulan

2. Asrama
  - a. Kecil (<50 orang) : Rp 175.000/bulan
  - b. Sedang (51 s/d 100 orang) : Rp 350.000/bulan
  - c. Besar (101 s/d 200 orang): Rp 700.000/bulan
3. Pedagang kaki lima (PKL)
  - a. Warung tenda atau angkringan : Rp 2.000/hari
  - b. Gerobak dorong atau gerobak motor : Rp 1.000/hari
  - c. Lapak : Rp 2.000/hari
  - d. Mobil kios : Rp 2.000/hari
4. Show room motor atau mobil
  - a. Kecil (<120 m<sup>2</sup>) : Rp 255.000/bulan
  - b. Sedang (<120 m<sup>2</sup> s/d 240 m<sup>2</sup>) : Rp 340.000/bulan
  - c. Besar (>240 m<sup>2</sup>): Rp 425.000/bulan
5. Rumah susun sewa (rusunawa)
  - a. Kecil (<100 unit) : Rp 800.000/bulan
  - b. Sedang (<101 s/d 200 unit) : Rp 1.600.000/bulan
  - c. Besar (>201 unit): Rp 2.400.000/bulan

#### **2.1.1.4. Tata Cara Pembayaran, Pengangsuran dan Penundaan Retribusi**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan Persampahan atau kebersihan, tata cara pembayaran, pengangsuran dan penundaan retribusi yaitu:

- a. Pembayaran retribusi kebersihan dilakukan melalui petugas atau tempat pemungutan terhadap setiap pelayanan atau setiap bulan masa retribusi.
- b. Pembayaran retribusi kebersihan, dilakukan berdasarkan (surat ketetapan retribusi daerah) SKRD atau karcis retribusi.
- c. Pembayaran retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dicatat dalam buku penerimaan.
- d. Pembayaran retribusi kebersihan harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- e. Pembayaran retribusi kebersihan yang dilakukan secara tunai dan lunas dibayarkan melalui petugas pemungut, bendahara penerimaan atau penyetoran ke rekening kas daerah pada BPD Riau Kepri.
- f. Pembayaran retribusi melalui petugas pemungut atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- g. Pembayaran retribusi melalui rekening kas daerah pada BPD Riau Kepri menggunakan (surat setoran retribusi daerah) SSRD dengan menyampaikan salinannya kepada kepala dinas.

### **2.1.2 Retribusi Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir, parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara atau ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir. Retribusi parkir ini merupakan pembayaran penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kota Batam terdapat 2 (dua) jenis retribusi parkir yang dibedakan yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi khusus parkir. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sedangkan retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### **2.1.2.1. Objek Retribusi Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Bagian Kesatu Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Pasal 11 objek Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir Bagian Kedua Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 19 objek retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Jasa pelayanan yang dimaksud meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas parkir ditempat khusus parkir
- b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir ditempat khusus parkir
- c. Menjaga ketertiban ditempat khusus parkir

#### **2.1.2.2. Subjek Retribusi**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir bagian kesatu retribusi parkir ditepi jalan umum, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat parkir.

#### **2.1.2.3. Struktur dan Besarnya Tarif**

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir bagian kesatu retribusi parkir ditepi jalan umum, tarif retribusi parkir kendaraan bermotor untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:

- a. Mobil penumpang, van, pick up, taksi :
  - 1. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,-
  - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,-
  - 3. Tarif parkir inap sebesar Rp. 30.000,- perhari.-
- b. Sepeda motor :
  - 1. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,-
  - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-
  - 3. Tarif parkir inap sebesar Rp. 15.000/hari.
- c. Bus atau truk :
  - 1. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,-
  - 2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,-
  - 3. Tarif parkir inap sebesar Rp. 50.000,- perhari.

### **2.1.3 Retribusi Pasar**

Retribusi Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan penyediaan fasilitas atau tempat berdagang kaki lima.

#### **2.1.3.1 Objek Retribusi Pasar**

Objek retribusi pasar atau pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pasar adalah



pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta (Marihhot, 2013:625).

#### **2.1.3.2 Subjek Retribusi Pasar**

Subjek Retribusi Pasar adalah perseorangan atau badan usaha yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat dan fasilitas berdagang kaki lima.

#### **2.1.3.3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Luas tempat berusaha atau berdagang;
- b. Jenis dan bentuk konstruksi tempat berusaha atau berdagang;
- c. Jangka waktu atau masa berlaku yang digunakan sebagai tempat usaha atau berdagang;
- d. Kelas pasar atau lokasi tempat berdagang.

#### **2.1.3.4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup keseluruhan atau sebagian biaya penyelenggaraan jasa pelayanan pasar dengan mempertimbangkan penyediaan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### **2.1.3.5. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang ialah sebagai berikut:

- a. Masa retribusi perizinan adalah jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan pada lokasi yang sama.
- b. Masa retribusi pelayanan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan 1 (satu) bulan.
- c. Masa retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **2.1.3.6. Penetapan Retribusi**

Penetapan retribusi ialah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **2.1.3.7. Tata Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan**

Tata pemungutan, pembayaran dan penagihan ialah sebagai berikut:

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b. Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.4.1 Pendapatan Daerah**

Adrian (2008:8) mengatakan bahwa pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih merupakan elemen yang cukup penting perannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah yang menambah ekuitas dan lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Darise, 2008:33). Pendapatan daerah terdiri atas:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim dan Kusufi, 2012: 101).

#### 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (penjelasan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005).

#### 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan

bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang, pengadaan jasa oleh daerah.

#### **2.1.4.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sektor pendapatan yang sangat penting karena pada sektor ini dapat dilihat perkembangan dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi pada kenyataannya sumber pembiayaan ini belum secara optimal memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah sehingga perlu peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Muhammad (2006: 235) pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa uraian pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan keuangan yang bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya yang akan digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

#### **2.1.4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan asli daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan instrument keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak Negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Bagi pemerintah daerah, penerimaan pajak yang terpenting dan dominan ialah yang bersumber dari pajak pembangunan, pajak hiburan atau tontonan dan pajak reklame. Selain itu, pajak bumi dan bangunan yang pada dasarnya merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dianggap sebagai sumber penerimaan pajak yang utama bagi daerah (Adrian, 2008:5).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Masyahrul (2006: 5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK. I, maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan dan bersifat paksaan yang akan dipergunakan untuk pembiayaan daerah dan pembangunan daerah.

#### **a. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang pajak daerah terdapat 2 jenis pajak, yaitu:

1) Pajak provinsi, terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat yang bergerak.

Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak air permukaan

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak rokok

Yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai, yaitu:

- a) konsumsinya perlu dikendalikan
- b) peredarannya perlu diawasi

- c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

2) Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

a. Pajak hotel

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Marihhot, 2016: 299).

b. Pajak restoran

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.



d. Pajak reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak penerangan jalan

Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak parkir

Yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air dan tanah

Yaitu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak sarang burung walet

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia funchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.

j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Dalam ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksudkan diatas. Jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Azhari, 2015:69).

Menurut Azhari (2015:69) ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota bersangkutan;

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan kriteria adalah bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan

peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

#### **b. Objek Pajak Daerah atau Kabupaten**

Objek pajak daerah menurut Undang-undang nomor 28 tahun, yaitu:

- a) Objek pajak hotel, adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- b) Objek pajak restoran, adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- c) Objek pajak hiburan, adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, pusat kebugaran, pertandingan olahraga.
- d) Objek pajak reklame, adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi: reklame papan *billboard*, *videotron*, *megatron*, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, reklame peragaan.

- e) Objek pajak penerangan jalan, adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik maupun yang diperoleh dari sumber lain
- f) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit atau andesit, gips, kalsit, kaolin dan lain sebagainya.
- g) Objek pajak parkir, adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h) Objek pajak air dan mineral, adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah, pengecualian dalam objek ini adalah pengambilan atau pemanfaatan air untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan.

### **c. Tarif Pajak Daerah**

Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting (Marihot, 2016: 84).

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang

Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar:

1. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk pajak Rumah Kos sebesar 5% (lima persen)
2. Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%; kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotek, karaoke, dan klab malam sebesar 45%; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliard, golf, dan bowling sebesar 10%
4. Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yaitu (koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame).

5. Pajak Penerangan Jalan

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh

- industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)
6. Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
  7. Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
  8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
  9. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

#### **d. Cara Perhitungan Pajak**

Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat (Marihot, 2016: 91)

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

**Rumus 2.1**  
**Perhitungan Pajak**

#### **e. Tata Cara Pemungutan**

Menurut ketentuan Undang-undang nomo 28 Tahun 2009, tata cara pemungutan pajak daerah yaitu:

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
- b. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), karcis atau nota perhitungan.
- d. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).

## **2. Retribusi Daerah**

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Retribusi Daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut M.P Siahaan 2010:6) ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu:



- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi ekonomi, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

**a. Kriteria Retribusi Daerah**

1. Retribusi Jasa Umum, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
  - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
  - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
  - c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
  - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
  - e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya

- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
  - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik
2. Retribusi Jasa Usaha, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau perizinan tertentu
  - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, ditentukan berdasarkan kriteria berikut:
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
  - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
  - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

#### **b. Jenis Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

## 1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Marihot, 2016:622). Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan (Azhari, 2105:280). Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pasar
- g) Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

## 2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Darwin, 2010:172). Objek retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan, pesinggahan, villa
- g) Retribusi Penyedotan Kakus
- h) Retribusi Rumah Pematangan Hewan
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j) Tempat Rekreasi Dan Olahraga
- k) Retribusi Penyebrangan Diatas Air
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi perizinan tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah). Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Azhari, 2015:287). Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu (Azhari, 2015:287). Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu ialah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Kesimpulan
Saifullah, Anwar, Marlina (2016) ISSN 2337-8085 Vlm No. 2	Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah Terhadap Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh	<b>Variabel Dependen:</b> Efektivitas Peningkatan Retribusi Sampah  <b>Variabel Independen:</b> Pencapaian Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh	Kontribusi retribusi sampah terhadap PAD diketahui telah mencapai 4 persen setiap tahunnya, namun masih perlu ditingkatkan untuk menambah PAD agar kelangsungan pembangunan berjalan.
Yasniva, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013) ISSN 2302-0172	Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	<b>Variabel Dependen:</b> Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.  <b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	Secara rata-rata presentase efektivitas pemungutan retribusi pelayanan Persampahan atau Kebersihan di Kota Banda Aceh selama 2002-2011 mencapai 87,7% dengan demikian pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah cukup efektif.
Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani (2014) ISSN 978-602-70429-2-6	Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	<b>Variabel Dependen:</b> Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir  <b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	Pajak Reklame dan Retribusi Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul.
Della Novia (2014) ISSN 2338-3651	Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di	<b>Variabel Independen:</b> Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan  <b>Variabel Independen:</b> Terhadap Pendapatan	kontribusi rata-rata yang diberikan retribusi parkir tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah terhadap

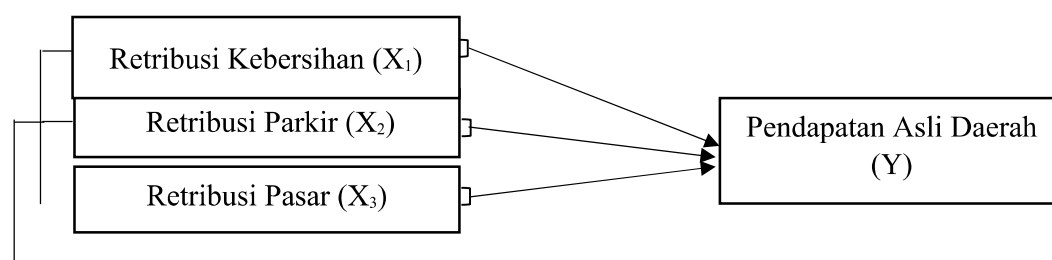
	Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012	Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012	pendapatan asli daerah di Kota Samarinda adalah sebesar 0,23%.
Sisca Yulia Murpratiwi (2013) ISSN 2338-3593	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus pada Pemerintah Kota Kediri)	<b>Variabel Independen:</b> Analisis Penerimaan Retribusi Parkir  <b>Variabel Independen:</b> Meningkatkan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus pada Pemerintah Kota Kediri)	Retribusi parkir terhadap PAD tahun 2010 4,39% tahun 2011 3,54% dan tahun 2011 2,90. Retribusi parkir terhadap PAD terus mengalami penurunan karena penerimaan realisasi PAD tidak stabil.
Andi Jumansah (2014) Vlm 2 No.1	Retribusi Parkir di Pasar Pagi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	<b>Variabel Dependen:</b> Retribusi Parkir di Pasar Pagi  <b>Variabel Independen:</b> Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda	Retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Samarinda masih perlu ditingkatkan sebab masih belum optimal.
Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim (2014) ISSN 2303-1174	Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	<b>Variabel Dependen:</b> Penerimaan Retribusi Pasar  <b>Variabel Independen:</b> Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rata-rata 5%. Walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.
Cantika Bella, Imam Hanafi, Abdul Wachid (2014) Vlm 2 No.4	Kontribusi Retribusi Pasar Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan	<b>Variabel Dependen:</b> Kontribusi Retribusi Pasar Wisata  <b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan	Kontribusi retribusi pasar wisata kota Malang sudah membatasi jumlah pedagang sehingga upaya untuk meningkatkan

	Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang)	Pariwisata dan Pedagang Pasar Minggu Kota Malang)	kontribusi terhadap PAD sulit dilakukan.
Novita Eka, Muhammad Saifi, Achmad Husaini (2015) Vlm 1 No.1	Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.	<b>Variabel Dependen:</b> Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya <b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto.	Kontribusi retribusi pelayanan pasar Tanjung dalam 4 tahun terakhir selalu menurun dikarenakan kurang optimalnya dalam pelaksanaan pemungutan.
I Dewa Gede Agung Dwi Temaja, I D. G. Dharma Suputra (2014) ISSN 2302-8556	Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar	<b>Variabel Dependen:</b> Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran <b>Variabel Independen:</b> Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar	Retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada PAD kabupaten Gianyar tahun anggaran 2008-2012.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi penerimaan retribusi Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar.

Adapun kerangka dalam pemikiran ini dapat digambarkan melalui bagan alur sebagai berikut:







Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Menurut Ma'ruf (2015:205) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris antara dua variabel. Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis Pertama ( $H_1$ ) :Terdapat kontribusi Retribusi Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Hipotesis Kedua ( $H_2$ ) :Terdapat kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

Hipotesis Ketiga ( $H_3$ ) :Terdapat kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Menurut silalahi (2012:180) desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, sedangkan menurut Nazir (2009:84) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Menurut Sarwono (2006:79) desain penelitian bagaikan peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah rencana yang disusun secara sistematis yang akan digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penelitian sehingga mendapat jawaban yang diinginkan.

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder menurut Andi (2010:2) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (*responden*) maupun dari suatu badan (*instansi*) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

## 3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:96) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variabel*).

### 3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Sugiyono (2012:59) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Variabel dalam penelitian ini adalah retribusi kebersihan, retribusi parkir dan retribusi pasar.

#### 1. Retribusi Kebersihan (X1)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan atau kebersihan yang disediakan, diberikan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum, pemilik atau pemakai persil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Retribusi Parkir (X2)

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir, retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Retribusi Pasar (X3)

Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau kios yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.2.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah Kota Batam.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Sektor pendapatan yang sangat penting karena pada sektor ini dapat dilihat perkembangan dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah, tetapi pada kenyataannya sumber pembiayaan ini belum secara optimal memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah sehingga perlu peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Muhammad (2006: 235) pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD

dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
(Variabel X1) Retribusi Kebersihan	Pemungutan atas jasa pelayanan kebersihan yang dilakukan pemerintah daerah	Realisasi penerimaan retribusi kebersihan	Rasio
(Variabel X2) Retribusi Parkir	Pemungutan atas jasa penyediaan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah	Realisasi penerimaan retribusi parkir	Rasio
(Variabel X3) Retribusi Pasar	Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya pelayanan penyediaan pasar	Realisasi penerimaan retribusi pasar	Rasio
(Variabel Y) Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalamnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan	1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rasio

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Berdasarkan uraian diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah data perbulan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batam dari tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2015, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 (enam puluh) populasi.

#### **3.3.2 Sampel**

Menurut Umi (2008:77) sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat mengambil sampel itu. Kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel tidak didasarkan atas strata, random atau wilayah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Maka sampel dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batam.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Menurut Musfiqon (2012:150) data adalah catatan atau kumpulan fakta yang berupa hasil pengamatan empiris pada variabel penelitian. Data dapat berupa angka, kata atau dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan variabel penelitian sehingga memiliki makna yang dapat dipahami. Data penelitian merupakan informasi tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris yang berupa angka atau pernyataan.

Jenis data terbagi dalam dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bilangan, tetapi berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan (Ma'aruf, 2015:124). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif meliputi realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Batam tahun 2011 - 2015.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Menurut Umi (2008:98) berdasarkan sumber datanya, data dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia

dalam bentuk terkompilasi ataupun bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapat informasi ataupun data. Sedangkan Menurut Umi (2008:402) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

Data merupakan hal yang penting dalam penelitian karena sangat menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian. Karena diperlukan suatu teknik mengenai masalah cara dan instrument yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperoleh. Menurut Nazir (2011:174) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung atau melalui buku profil Dinas Pendapatan Kota Batam. Data ini berupa laporan tahunan realisasi retribusi daerah Kota Batam.

### **3.4.3 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di instansi atau perusahaan yang menjadi objek penelitian.



- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian.
  - b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan.
2. Studi Kepustakaan

Yaitu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012:291).

### **3.5 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2009:426) analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Sedangkan menurut Noor (2011:163) analisis merupakan tindakan mengolah data sehingga menjadikan informasi yang bermanfaat dalam menjawab masalah penelitian. Pemilihan metode analisis harus sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan.

### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Menurut Priyatno (2011: 25) analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data, seperti mean, sum, standar deviasi, max, min serta digunakan untuk mengukur distribusi data. Menurut sugiyono (2014:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:8).

Dalam penelitian ini, data diolah menggunakan program aplikasi SPSS (*statistical Package for the Social Science*) versi 24. Program SPSS ini dapat melakukan beberapa uji terhadap data-data yang akan digunakan dalam penelitian dengan memberikan gambaran hubungan antar variabel independen dan variabel dependen.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghazali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal,

bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak menjadi valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik merupakan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal, uji normalitas data dilakukan dengan uji *kolmogorov smirnov*. Apabila data pengamatan tidak berdistribusi normal maka analisis parametrik tidak bisa digunakan karena statistik dalam analisis parametrik diturunkan dari distribusi normal (Sugiyono, 2011:239).

Uji normalitas memiliki distribusi normal jika akan membentuk kurva menyerupai lonceng (*bell shaped*) dan keberadaan titik-titik nilai residu berada disekitar diagonal. Menurut Priyatno (2010:58) kurva nilai residu tersandarasi dikatakan normal jika nilai:

1. *Asymp. Sign (2-tailed)* >  $\alpha$  ; *sig* > 0,05
2. Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal

### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Menurut Wibowo (2012:87) bahwa dalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, maksudnya tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011:105).

Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala

multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool* uji yang disebut *variance Inflation Factor* (VIF) (Wibowo, 2012:87).

Menurut Algifari dalam Wibowo, 2012:87 jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan mengorelasikan antar variabel bebasnya, bila nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya tidak lebih besar dari 0,5 maka dapat ditarik kesimpulan model persamaan tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Wibowo (2012:93) suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang digunakan, misalnya metode Barlet dan Rank Spearman atau Uji Spearman's rho, metode grafik Park Gleyser.

Uji Park Gleyser digunakan dengan cara mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-masing variabel independen. Jika probabilitasnya memiliki nilai signifikansi  $>$  nilai alphanya yaitu 0,05 maka model tidak mengalami heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan mengamati grafik *scatter plot* pada *output* SPSS. Menurut Priyatno (2009) ketentuannya grafik *scatter plot* adalah sebagai berikut:

1. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

#### **3.5.2.4 Uji Autokorelasi**

Menurut Wibowo (2012:101) uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model.

Menurut Ghozali (2011:101) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auto korelasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan metode grafik, metode *durbin-watson*, metode run test, dan uji statistik parametric (Wibowo, 2012:101)

**Tabel 3.2 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tanpa Kesimpulan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negative	Tanpa Kesimpulan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Wibowo, 2012: 102

Kesimpulan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada; jika nilai Durbin-Watson berada pada range nilai  $dU$  hingga  $(4-dU)$  maka ditarik kesimpulan bahwa mode tidak terdapat autokorelasi.

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2010:61) analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan data untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Menurut Wibowo (2012:126) analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Penggunaan model regresi sebagai alat uji akan memberikan hasil yang baik jika dalam model tersebut, data memiliki syarat-

syarat tertentu atau dianggap memiliki syarat-syarat tersebut. Diantara syarat tersebut adalah; data yang digunakan memiliki tipe data berskala interval atau rasio, data memiliki distribusi normal, memenuhi uji asumsi klasik.

Regresi linear berganda dinotasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (variabel respon)

A = nilai konstanta

b = nilai koefisien regresi

X<sub>1</sub> = variabel independen pertama

X<sub>2</sub> = variabel independen kedua

X<sub>3</sub> = variabel independen ketiga

X<sub>n</sub> = variabel independen ke-n

### **3.5.4 Uji Hipotesis**

#### **3.5.4.1 Uji Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2011:98) uji simultan (uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Menurut Priyatno (2010:67) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (terikat).

Menurut Sunyoto (2011: 17) langkah pengujian simultan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh  $X_1, X_2, X_3$  terhadap  $Y$

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ , berarti ada pengaruh  $X_1, X_2, X_3$  terhadap  $Y$

2. Membuat keputusan uji F

3. Kriteria pengujian

### 3.5.4.2 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2012:98) uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Menurut Sugiyono (2011:97) dalam uji t ada 2 (dua) jenis kriteria pengujian yaitu:

1. Pengujian dua arah (*two tail test*)

Pengujian dua arah digunakan ketika kita tidak memiliki dasar teori yang kuat mengenai bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

2. Pengujian satu arah (*one tail test*)

Pengujian satu arah digunakan ketika memiliki dasar teori yang kuat mengenai bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

Adapun pengujian yang dilakukan dengan ketentuan sesuai kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan menurut Sugiyono (2011:97) adalah:

1. Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima



### 3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2011:97) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Nilai  $R^2$  berbeda antara 0 sampai dengan 1, jika  $R^2$  sama dengan 0 maka variabel independen terhadap variabel dependen tidak memiliki pengaruh, sedangkan jika  $R^2$  sama dengan 1 maka variabel independen terhadap variabel dependen memiliki pengaruh yang signifikan atau sempurna.

Menurut Santoso dalam Priyatno (2008:81) *Adjusted R square* adalah *R square* yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari *R square*, dari angka ini bisa memiliki harga negatif. Untuk regresi dengan lebih dua variabel bebas digunakan *Adjusted R square* sebagai koefisien determinasi.

## 3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 3.6.1 Lokasi

Penelitian ini berfokus pada Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir dan Retribusi Pasar selama 5 tahun yaitu dari 2011 sampai dengan tahun 2015. Data penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Batam yang beralamat di Gedung Bersama Lantai 2 Batam Centre.

### 3.6.2 Jadwal Penelitian

